

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pekerjaan dapat diartikan sebagai salah satu kebutuhan yang penting, yang perlu dimiliki setiap individu. Dengan bekerja individu dapat mengaktualisasikan dirinya, dapat memberi pengaruh positif kepada orang lain, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan maupun orang lain. Bekerja dapat menjadi usaha untuk menopang hidup sendiri dan dapat menjadi sarana untuk membantu orang lain. Dalam skala yang lebih luas, bekerja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) ditegaskan, “Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini mengatakan bahwa pekerjaan merupakan salah satu hak asasi yang melekat dalam diri setiap manusia yang wajib dihormati. Hanya permasalahannya kini adalah pengangguran meningkat dan kemudian menjadi polemik dalam kehidupan komunal bangsa Indonesia. Kini, pengangguran menyebar di seluruh kota di Indonesia.

Kota Bandung (sebagai rujukan penulis) sebagai salah satu kota besar di Indonesia menjadi tujuan bagi para pencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar mestinya dapat memberi kontribusi yang signifikan pada pembangunan dan kemajuan kota Bandung. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kota Bandung.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah / <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	92 798	88 580	181 378
5-9	90 935	87 077	178 012
10-14	98 826	93 211	192 037
15-19	102 232	96 706	198 938
20-24	100 290	97 357	197 647
25-29	101 090	98 185	199 275
30-34	97 745	93 728	191 473
35-39	98 581	92 833	191 414
40-44	96 582	93 003	189 585
45-49	85 944	84 974	170 918
50-54	76 611	77 989	154 600
55-59	64 166	67 580	131 746
60-64	50 611	53 561	104 172
65-69	38 312	41 893	80 205
70-74	21 481	24 005	45 486
75+	18 930	27 127	46 057
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 235 134</b>	<b>1 217 809</b>	<b>2 452 943</b>

Catatan/*Note*: Data yang disajikan merupakan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni)/

*The data presented is the result of the projection of interim population 2020-2023 (mid-year / June)*

Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik /BPS-Statistics Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.452.943 jiwa dengan jumlah masyarakat produktif paling tinggi .Namun karena keterampilan atau soft skill yang dimiliki oleh para pencari kerja cenderung minim maka cukup banyak di antara mereka gagal memenuhi kriteria perusahaan yang dilamar. Alhasil, terjadi peningkatan pengangguran terutama di kota Bandung. Pengangguran di kota Bandung secara signifikan mengalami persentasi peningkatan yang cukup signifikan terutama ketika terjadi wabah global, pandemi COVID-19 pada 2018 hingga 2021. Meskipun angka persentasi peningkatannya kecil namun sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat, yang akhirnya juga mempengaruhi perekonomian kota Bandung. Angka peningkatan pengangguran

setidaknya cukup memberikan peringatan bagi pemerintah kota Bandung khususnya dinas terkait untuk segera mencari solusi melalui program-program yang diberikan sehingga pengangguran menjadi semakin berkurang bahkan tidak ada. Berikut akan ditampilkan tabel angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2021**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah/Total
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
<i>Educational Attainment</i>	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah , Tidak/Belum Tamat SD Sekolah atau Tamat Sekolah Dasar <i>No Schooling or Not Yet Completed Primary School Or Primary School</i>	12 343	6 238	18 581
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	15 939	12 440	28 379
Sekolah Menengah Atas dan	27 659	13 727	41 386

Sekolah Menengah			
Kejuruan			
<i>Senior High School and Vocational High School</i>			
Sekolah Menengah	26 551	10 414	36 965
Kejuruan			
<i>Vocational High School</i>			
Diploma I/II/III	2 193	4 463	6 656
<i>Academy</i>			
Universitas	12 790	8 748	21 538
<i>UNiversity</i>			
<b>Jumlah/Total</b>	<b>97475</b>	<b>56030</b>	<b>153 505</b>

Sumber/Source: :BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/ *August National Labor Force Survey*

Berdasarkan tabel yang dipaparkan maka dapat dilihat bahwa pengangguran yang terbanyak di Kota Bandung adalah mereka yang lulusan SMA ataupun SMK yang dimana belum memiliki keahlian yang unggul yang dapat mereka gunakan untuk melamar pekerjaan.

Bagaimanapun pengangguran sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung itu sendiri. Rendahnya tingkat produktivitas dan kompetensi (apabila dibandingkan dengan masyarakat lokal dari daerah lain maupun warga asing) turut menambah tingkat pengangguran di Kota Bandung. Tentu fakta ini adalah suatu persoalan yang amat serius. Pengangguran adalah salah satu isu sosial yang krusial yang dapat menimbulkan krisis sosial lainnya seperti kejahatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kemiskinan terutama di Kota Bandung. Tak ayal, masalah pengangguran pun menjadi semakin problematis ketika pandemi COVID-19 menginfeksi dunia termasuk seluruh wilayah Indonesia, salah satunya,

kota Bandung. Pandemi COVID-19 menyebar luas ke seluruh dunia menyebabkan penderitaan dan kerugian masif, yang dapat dilihat dengan runtuhnya ketahanan ekonomi negara-negara maju dan berkembang.

Berbagai upaya pencegahan terhadap penyebaran virus dilakukan dengan cara menerapkan praktik *social distancing*, *physical distancing*, dan pembatasan berskala besar. Akan tetapi kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari pemutusan kontrak kerja, ditutupnya ruang-ruang publik, pelarangan kegiatan berkumpul dalam jumlah besar hingga adanya kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian perusahaan maupun institusi pemerintahan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan *new normal* atau masa normal baru dimana dalam kebijakan ini masyarakat dapat beraktivitas seperti sediakala namun dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan normal baru ini seakan membawa angin segar bagi masyarakat terkait pekerjaan dan interaksi sosial. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmita, mengatakan bahwa :

“*new normal* sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Ini menjadi skenario mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan normal baru dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing wilayah. Prinsip utama dari rencana normal baru yang diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan normal baru dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat”.

Dalam konteks kota Bandung, dampak COVID-19 sangat terasa terutama terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Bandung. Dari toko kecil hingga perusahaan-perusahaan besar terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi, mulai dari pengurangan insentif karyawan hingga pemberhentian sebagian karyawan karena berkurangnya produksi yang

dihasilkan di kala pandemi. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) turut terkena dampak karena diberlakukannya pembatasan kegiatan sehingga usaha-usaha yang digeluti mengalami penurunan pendapatan. Bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada pekerjaan, permasalahan ekonomi keluarga turut terkena imbas secara khusus perihal pemenuhan kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder yang semakin sulit.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap angka pengangguran di kota Bandung, terhitung sejak kasus pertama pada pertengahan bulan Maret 2020. Angka pengangguran di kota Bandung meningkat, yang pada 2019 sebanyak 105.067 naik menjadi 147.081 sebagaimana dilansir oleh badan statistik kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja memiliki beberapa program dalam upaya menanggulangi terjadinya peningkatan pengangguran di kota Bandung. Salah satunya adalah kerjasama dengan beberapa perusahaan perihal informasi lowongan pekerjaan, pengadaan *job fair* secara online dan penggunaan aplikasi pendukung yaitu *new BIMMA* yang dirilis pada 2021, yang mana dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan, program pelatihan, dan magang. Salah satu program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kota Bandung melalui dinas tenaga kerja adalah program pelatihan berbasis masyarakat dimana dalam program tersebut pemerintah melaksanakan pelatihan berdasarkan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Bandung dengan cara memfasilitasi program pelatihan sangat diperlukan demi tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu disediakan oleh pemerintah dalam mendukung terselenggaranya program pelatihan kerja yang baik. Dari

berbagai pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, tentunya penting dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang dapat membantu pemerintah dalam setiap proses pelatihan kerja. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di kota Bandung menjadi salah satu tugas yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang mampu memiliki keterampilan dan keahlian agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.

Salah satu peran pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja produktif selain dapat meningkatkan stabilitas perekonomian kota Bandung dapat juga mengurangi pengangguran. Secara umum stabilitas ekonomi kerap kali terganggu oleh karena beberapa faktor, antara lain, rendahnya semangat wirausaha di kalangan masyarakat, situasi pandemi yang membuat masyarakat enggan mengambil risiko, rendahnya keterampilan serta kreativitas dalam usaha, produktivitas tenaga kerja yang rendah, etos kerja yang tidak tepat, kurangnya disiplin terhadap waktu, ketidaktepatan dalam melaksanakan tugas, dan loyalitas yang cenderung tinggi pada diri sendiri tetapi tidak terhadap organisasi. Sementara itu, di sisi lain, pembangunan ketenagakerjaan pun diatur. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas kekompakan dan kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
- (Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

A.N Rasyid dalam penelitiannya tentang strategi dinas sosial tenaga kerja dan

transmigrasi dalam mengurangi pengangguran di kota Yogyakarta (2018) memberikan hasil bahwa ada beberapa strategi yang harus dilakukan dalam pengurangan pengangguran yaitu (1) strategi pelatihan kerja dan produktifitas dilakukan dengan mengadakan pelatihan *mobile training unit* dan pelatihan institusional, (2) strategi penempatan kerja dan perluasan kerja dilakukan dengan cara antar kerja lokal, antar kerja daerah, antar kerja negara, padat karya infrastruktur, pameran bursa kerja, pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

Selain itu dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Yunisa Sukmana (2019) mengenai efektifitas program pelatihan dan produktivitas dalam mengurangi jumlah pengangguran di kota Bandung memberikan hasil bahwa tujuan dari pelatihan adalah memberikan bekal kepada peserta untuk mampu bekerja dan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Terkait dengan kendala modal usaha, tidak menutup kemungkinan, akan disponsori oleh pemerintah kota yang sudah bekerjasama dengan instansi dalam pemberian modal usaha. Sedangkan hasil dari penelitian Desi Fitriani tentang peran pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dikota Bandung (2016) mengatakan bahwa pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang dilakukan dinas tenaga kerja kota bandung sudah baik hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau hambatan seperti kelengkapan dan standarisasi sarana dan prasarana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi pada masa normal baru di Kota Bandung terutama ditinjau dari aspek tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan dan pembelajaran yang merupakan konsep Geoff Mulgan.



### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud memberi pemahaman secara deskriptif kepada masyarakat umum Kota Bandung dan mendeskripsikan tentang strategi dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi pada masa normal baru di Kota Bandung. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tujuan dinas tenaga kerja kota bandung dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi dimasa normal baru
2. Untuk memahami lingkungan dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi dimasa normal baru di Kota Bandung
3. Untuk mendalami pengarahannya dari dinas tenaga kerja kota bandung dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi dimasa normal baru di Kota Bandung
4. Untuk memahami dan mengartikan tindakan apa yang dilakukan dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi di masa normal baru di Kota Bandung
5. Untuk memahami dan menginterpretasikan pembelajaran yang dilakukan dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi dimasa normal baru di Kota Bandung

## 1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kegunaan kepada masyarakat umum dan juga pihak-pihak yang terkait secara khusus, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi masyarakat dan juga terkait bidang ilmu pemerintahan perihal strategi dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi di masa normal baru.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan peneliti dalam memahami strategi dinas tenaga kerja kota Bandung dalam mengatasi pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi di masa normal baru

#### b. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi dinas tenaga kerja kota Bandung dalam menjalankan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di kota Bandung.

#### c. Bagi program studi ilmu pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan juga bahan pembelajaran untuk pengembangan program studi pemerintahan dalam strategi pemerintahan khususnya dinas tenaga kerja kota Bandung.

#### d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang strategi pemerintah khususnya dinas tenaga kerja kota Bandung dalam menyelenggarakan program untuk mengatasi pengangguran di kota Bandung khususnya di masa normal baru.